



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 01 Februari 2017

Halaman: 1

Arep Dadi Golek Duit, Wis Dadi Golek Duit

JOGIA – Praktik politik uang (*money politics*) kerap mewarnai pelaksanaan pilkada. Menjelang pemilihan wali kota (Pilwali) 2017 pada 15 Februari nanti, masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemilih Pemula (JPP) Jogjakarta mendatangi KPU Kota Jogja. Kedatangan mereka guna mengingatkan bahaya politik uang.

► Baca *Arep...* Hal 7

■ AREP...

Sambungan dari hal 1

Dua orang peserta aksi menempeli tubuhnya dengan amplop berbagai jenis. Sambil berorasi, belasan peserta aksi juga melakukan pembakaran terhadap ratusan amplop berbagai ukuran di depan halaman Kantor KPU Jogja.

"Amplop ini sebagai simbol politik uang yang kerap terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada," kata Koordinator aksi Ardy Syihab di sela aksi kemarin (31/1).

Dia mengingatkan masyarakat, para calon yang melakukan politik uang, kelak saat pemimpin tidak akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Sebab, para pemimpin tersebut akan sibuk mencari duit sebagai ganti uang yang telah dihabiskan pada masa pemilu.

"*Arep dadi nyebar duit, wes dadi ngolek duit* (ketika maju menyebar uang, ketika sudah jadi mencari uang)," sindir Ardy.

Bahkan dia menyamakan politik uang dengan praktik rehenir atau lintah darat yang membagi-bagikan uang. Kemudian dalam memerintah akan cenderung mencari uang sehingga program kesejahteraan rakyat bisa terabaikan.

Dia menjelaskan, JPP telah berkoordinasi dengan Ikatan Mahasiswa Jogjakarta guna melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik politik uang. Sebanyak dua orang relawan disebar di setiap kecamatan untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi tentang bahaya politik uang.

"Untuk membuat pemerintahan yang bersih politik uang

harus dilawan," katanya.

Selain persoalan politik uang, Ardy menyebut, pada masa kampanye di Jogja kali ini, pemilih pemula belum mengetahui program-program yang disampaikan oleh para pasangan calon (paslon). Sebab, sejauh ini paslon yang tengah bersaing kurang bersinggungan dengan para pemilih pemula.

Di samping itu, sambungnya, energi pilkada serentak tertuju pada perpolitikan yang ada di Jakarta. Hingar-bingar pilkada seolah hanya ada di Jakarta sehingga pelaksanaan pilkada di daerah seperti terabaikan.

"Masyarakat lebih banyak membicarakan visi misi pasangan calon kepala daerah yang ada di Jakarta, sedangkan di daerah sendiri tidak diketahui," katanya.

Di tempat yang sama, anggota Panwas Jogja Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Iwan Ferdian menyebut sejauh ini belum ada laporan terkait adanya praktik-praktik politik uang pada masa kampanye. Meski begitu, pihaknya tetap akan mewaspadai keberadaan politik uang saat pelaksanaan pilkada.

"Bila menemukan adanya *money politics* langsung datang ke Panwas disertai dengan bukti yang cukup beserta saksi," jelasnya.

Dijelaskan, politik uang yang banyak terjadi yakni dengan pemberian amplop kepada warga untuk memilih pasangan tertentu. Tidak hanya itu, politik uang juga termasuk pemberian bantuan-bantuan material tertentu.

Sesuai dengan peraturan yang ada, mereka yang kedapatan melakukan praktik politik uang akan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi tersebut diberikan kepada pemberi maupun penerima.

Komisioner KPU Jogja Sri Surani berjanji KPU Kota tetap berada dalam lajur perundangan untuk menolak politik uang. KPU Jogja berkomitmen menyelenggarakan Pilkada Jogja bersih dari politik uang. "Komitmen kami bisa dipegang. Kami akan tegas apabila menemukan politik uang," tandasnya.

Sementara itu, dua paslon yang bersaing dalam Pilwali Jogja menyatakan akan bersih dari praktik politik uang. Ditemui saat kampanye di Ledok Tukangan Jogja, calon Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan sikapnya yang menolak praktik politik uang. Menurut dia, sebagai langkah pencegahan yang akan dilakukannya tidak hanya kepada penerima saja, tapi juga pemberi. Untuk itu, sosialisasi politik uang ke masyarakat terus dilakukan oleh timnya.

"Mengingatkan tidak hanya ke masyarakat, paslon juga harus terus diingatkan dan berkomitmen supaya tidak menerima politik uang," jelasnya.

Di kubu paslon Imam Priyono, perang terhadap politik uang juga sudah dicanangkan oleh DPC PDIP Kota Jogja. Melalui Ketuaannya Danang Rudiymoko, DPC PDIP Kota Jogja sudah menerjunkan satuan tugas (Satgas) antipolitik uang di semua Kelurahan di Kota Jogja.

Masing-masing kelurahan terdapat lima Satgas. Juga menjanjikan imbalan uang sebesar Rp 5 juta bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku politik uang. "Uang Rp 5 juta itu bukan suap, tapi untuk mendiak masyarakat," ujar Danang. (bhn/pr/ila/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005